**"ANALISIS PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI QRIS SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL**

**PADAMAHASISWA UNIVERSITAS (UNILA)"**

**(Tugas Bab 2 Metode Penelitian Administrasi Publik)**

**Oleh**

**ANISA REGINA PUTRI**

**NPM 2416041119**

****

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan tema yang relevan terhadap penelitian yang sedang dikerjakan.Telaah ini berfungsi untuk memetakan perkembangan studi, memperkaya pemahaman peneliti, menghindari pengulangan tema yang sama, serta menemukan celah penelitian (research gap) yang dapat diisi. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian terdahulu merupakan pijakan penting yang menempatkan karya ilmiah baru dalam peta keilmuan serta mempertegas kontribusi kebaruan (novelty) yang ditawarkan.Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saputra dan Hendrianto (2023) meneliti *Efektivitas penggunaan QuickResponse Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran digital pada dosen ASN IAIN Curup*. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran efektivitas pelayanan publik dengan menekankan pada indikator kemudahan, kecepatan, dan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS dinilai efektif karena mampu mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan dalam pembayaran digital. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan literasi digital di kalangan dosen yang membuat pemanfaatan QRIS belum optimal. Penelitian ini relevan dengan penelitian sekarang karena sama-sama menyoroti peran literasi digital, meskipun objek kajiannya berbeda.
2. Prasetyo (2025) melakukan penelitian berjudul Analisis pengaruh efektivitas dan efisiensi QRIS terhada*p inklusi keuangan dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi.* Penelitian ini menggunakan kerangka literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan untuk menjelaskan hubungan antara efektivitas QRIS dan keterjangkauan layanan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah terbukti memperkuat efektivitas dan efisiensi QRIS, terutama dalam mendorong inklusi keuangan di masyarakat umum dan pelaku UMKM. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara QRIS dan literasi, penelitian ini belum menyoroti aspek literasi digital dan tidak menjadikan mahasiswa sebagai objek kajian. Perbedaan konteks ini menjadi relevansi sekaligus pembeda dengan penelitian sekarang.
3. Ramba (2024) menulis artikel ilmiah berjudul *Pengaruh literasi keuangan digital, perceivedenjoyment, efikasi diri, dan pengaruh sosial terhadap intentiontouse QRIS payment.* Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Davis (1989) sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku penerimaan teknologi, kemudian diperkaya dengan faktor psikologis lain seperti kesenangan, efikasi diri, dan pengaruh sosial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa literasi keuangan digital memberikan pengaruh signifikan terhadap niat penggunaan QRIS, bersama dengan faktor psikologis lainnya. Akan tetapi, penelitian ini hanya membahas niat penggunaan (*intentiontouse*), belum menyentuh efektivitas nyata QRIS dalam praktik sehari-hari. Relevansi penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada sama-sama menekankan pentingnya literasi, tetapi dengan fokus dan objek kajian yang berbeda.

Dari uraian ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi mengenai QRIS telah dilakukan dari berbagai perspektif, baik efektivitas penggunaan oleh dosen, literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan, maupun faktor psikologis yang memengaruhi niat penggunaan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah literasi digital mahasiswa dan hubungannya dengan efektivitas implementasi QRIS di lingkungan kampus. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang penting, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kebaruan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait transformasi pelayanan publik digital.

**2.2 Teori dan Konsep**

**2.2.1 Literasi Digital**

Literasi digital merupakan salah satu kompetensi penting dalam menghadapi transformasi digital yang semakin masif. Gilster (1997) pertama kali memperkenalkan istilah literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk yang disajikan melalui komputer. Definisi ini kemudian diperluas oleh UNESCO (2018), yang memandang literasi digital sebagai seperangkat keterampilan kognitif, teknis, dan sosio-emosional yang dibutuhkan untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan etis. Dalam konteks pendidikan, literasi digital bukan hanya sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kesadaran akan aspek keamanan, etika, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi.

Ferrari (2013) melalui kerangka *Digital CompetenceFramework* atau *DIGCOMP* membagi literasi digital ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu penggunaan informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, penciptaan konten digital,keamanan digital, dan pemecahan masalah. Kelima dimensi ini menegaskan bahwa literasi digital adalah keterampilan multidimensi yang melibatkan aspek pengetahuan, sikap, serta praktik nyata dalam menggunakan teknologi. Artinya, individu yang memiliki literasi digital tinggi tidak hanya mampu menggunakan perangkat, tetapi juga dapat menilai kualitas informasi, bekerja sama secara daring, menjaga keamanan data, serta berinovasi dalam menghasilkan konten digital.

Dalam konteks mahasiswa, literasi digital menjadi kompetensi fundamental karena mereka termasuk generasi *digital native* yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, kedekatan dengan teknologi tidak otomatis berarti memiliki literasi digital yang memadai. Penelitian APJII (2023) menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 78 persen, masih terdapat kesenjangan pemahaman terkait keamanan data, etika bermedia, dan penggunaan teknologi untuk tujuan produktif. Hal ini penting karena literasi digital yang rendah dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik berbasis digital, termasuk pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran. Oleh karena itu, kajian literasi digital pada mahasiswa menjadi relevan untuk melihat sejauh mana kelompok ini siap mendukung transformasi pelayanan publik digital di Indonesia.

**2.2.2 Efektivitas Pelayanan Publik Digital**

Efektivitas dalam administrasi publik dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa efektivitas adalah salah satu kriteria evaluasi kebijakan publik yang mengukur sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menyangkut manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan publik ke arah digital. Efektivitas pelayanan publik digital dapat dilihat melalui tingkat aksesibilitas, efisiensi, transparansi, serta kepuasan pengguna. Model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan DeLone dan McLean (2003) memberikan kerangka analisis yang relevan dalam menilai efektivitas layanan digital. Model tersebut mencakup dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang bersama-sama menentukan tingkat kepuasan pengguna dan manfaat bersih yang diperoleh. Dengan demikian, pelayanan publik digital yang efektif adalah layanan yang mudah diakses, menyediakan informasi yang akurat, didukung oleh sistem yang andal, dan memberikan kepuasan bagi pengguna.

Dalam konteks Indonesia, efektivitas pelayanan publik digital menjadi agenda penting seiring dengan kebijakan transformasi digital pemerintah. Bank Indonesia, misalnya, meluncurkan QuickResponse Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai inovasi dalam sistem pembayaran digital untuk mendorong terciptanya efisiensi dan inklusi keuangan nasional (Bank Indonesia, 2020). Keberhasilan implementasi QRIS sebagai bagian dari pelayanan publik digital dapat diukur dari kemampuannya menyediakan layanan pembayaran yang cepat, aman, murah, dan dapat digunakan secara luas. Namun, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat, termasuk mahasiswa, yang menjadi salah satu kelompok pengguna utama teknologi pembayaran digital.

Dengan demikian, efektivitas pelayanan publik digital tidak hanya ditentukan oleh kinerja teknis sistem, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kompetensi pengguna, kebijakan pendukung, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan. Penelitian ini menekankan bahwa literasi digital mahasiswa menjadi salah satu variabel kunci yang berpotensi memengaruhi tingkat efektivitas implementasi QRIS di lingkungan kampus. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas pelayanan publik digital menjadi landasan konseptual penting untuk menganalisis keterkaitan antara literasi digital dan pemanfaatan QRIS.

**2.2.3 QRIS sebagai Inovasi Pelayanan Publik Digital**

QuickResponse Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar nasional kode respons cepat yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tahun 2019. Sebelum adanya QRIS, setiap penyelenggara aplikasi pembayaran digital menggunakan kode QR masing-masing, sehingga transaksi hanya dapat dilakukan apabila konsumen dan pedagang menggunakan aplikasi yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi sistem pembayaran yang tidak efisien. QRIS hadir untuk menyatukan berbagai kode QR tersebut ke dalam satu standar nasional, sehingga seluruh aplikasi pembayaran digital dapat berfungsi secara lintas platform dengan menggunakan satu kode QR yang sama (Bank Indonesia, 2020).

Penyatuan berbagai kode QR ini dilakukan melalui proses standarisasi teknis oleh Bank Indonesia. Seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran diwajibkan menyesuaikan sistem aplikasinya agar mampu membaca format QRIS. Dengan demikian, ketika konsumen memindai satu kode QRIS menggunakan aplikasi apapun, data transaksi akan dikenali sesuai standar yang ditetapkan. Aplikasi pembayaran kemudian menghubungkan transaksi ke bank atau penyedia jasa sistem pembayaran terkait, dan dana akan disalurkan ke akun atau rekening pedagang. Proses ini memastikan adanya interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai aplikasi pembayaran untuk saling terhubung menggunakan satu kode QR.

Fungsi utama QRIS adalah menciptakan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem pembayaran digital. Pedagang cukup menggunakan satu kode QR untuk melayani berbagai aplikasi pembayaran, sehingga tidak perlu menyiapkan banyak kode dari penyedia berbeda. Konsumen juga memperoleh kemudahan karena dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang dimiliki tanpa harus menyesuaikan dengan kode QR tertentu. Selain itu, seluruh transaksi yang diproses melalui QRIS tercatat secara otomatis dalam sistem yang diawasi oleh Bank Indonesia, sehingga aspek keamanan dan transparansi lebih terjamin.

Tujuan implementasi QRIS sejalan dengan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* 2025, yang menekankan pada integrasi, inklusi, efisiensi, serta penguatan ketahanan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia (2020) menegaskan bahwa QRIS diharapkan mampu mendorong efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, mendukung masyarakat nontunai (*cashlesssociety*), serta memperkuat digitalisasi ekonomi. Data Bank Indonesia (2024) menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah merchant maupun volume transaksi menggunakan QRIS, yang menandakan adopsi layanan ini semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat.

Sebagai inovasi pelayanan publik digital, QRIS memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik di bidang keuangan. Tambunan (2020) menekankan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman Tiongkok dalam mengembangkan pembayaran berbasis QR yang sukses mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Dengan penerapan QRIS, tidak hanya sektor formal yang mendapatkan manfaat, tetapi juga sektor informal seperti UMKM, warung kecil, parkiran, dan kantin kampus. Inklusivitas ini menegaskan bahwa QRIS adalah bentuk nyata kebijakan publik digital yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun, efektivitas implementasi QRIS masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya literasi digital sebagian pengguna. Tidak semua individu memahami cara penggunaan aplikasi, keamanan transaksi, serta potensi manfaat jangka panjang dari layanan pembayaran digital ini. Oleh karena itu, keberhasilan QRIS tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh tingkat kompetensi digital masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok *digital native*menjadi penting untuk diteliti karena selain berperan sebagai pengguna aktif, mereka juga merepresentasikan kesiapan generasi muda dalam mendukung transformasi pelayanan publik digital di Indonesia.

Dengan demikian, QRIS dapat dipandang sebagai inovasi pelayanan publik digital yang menyatukan aspek kebijakan, teknologi, dan perilaku pengguna. Penelitian mengenai efektivitas penggunaan QRIS pada mahasiswa menjadi relevan karena dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan publik di bidang sistem pembayaran digital berhasil diimplementasikan, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

**2.2.4 Administrasi Publik Digital dalam Inovasi Sistem Pembayaran**

Administrasi publik digital merupakan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Heeks (2018) menegaskan bahwa administrasi publik digital tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma birokrasi, pengambilan keputusan, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam kerangka ini, teknologi menjadi instrumen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan partisipatif.

Penerapan administrasi publik digital di Indonesia diwujudkan dalam berbagai kebijakan nasional, salah satunya melalui *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* 2025 yang disusun oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini menempatkan digitalisasi sistem pembayaran sebagai salah satu pilar utama transformasi layanan publik. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah lahirnya QuickResponse Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS hadir untuk menyatukan berbagai kode QR pembayaran digital yang sebelumnya terfragmentasi, sehingga memungkinkan terjadinya interoperabilitas lintas aplikasi pembayaran (Bank Indonesia, 2020).

Keberadaan QRIS dapat dikaitkan secara langsung dengan konsep *e-government*. Indrajit (2020) menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, QRIS merupakan bagian dari digitalisasi layanan publik di bidang sistem pembayaran, yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara cepat dan aman. Dengan demikian, QRIS bukan hanya instrumen finansial, melainkan juga wujud konkret dari implementasi *e-government* di sektor keuangan.

Selain itu, QRIS juga berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dunn (2018) menekankan bahwa pelayanan publik harus memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, dan responsivitas. QRIS menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan akses transaksi yang lebih inklusif, biaya yang rendah, proses yang cepat, serta kenyamanan bagi masyarakat. Kehadiran QRIS memungkinkan pedagang kecil, mahasiswa, hingga UMKM untuk mengakses layanan pembayaran digital tanpa harus memiliki infrastruktur yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS berperan sebagai inovasi pelayanan publik digital yang memperluas akses dan menjamin kesetaraan.

Dari perspektif tata kelola, QRIS juga mendukung prinsip-prinsip *goodgovernance*. Transparansi tercermin dari pencatatan transaksi yang tersistem dan dapat dipantau. Akuntabilitas terjamin melalui pengawasan Bank Indonesia sebagai regulator utama. Efisiensi diperoleh dari penyederhanaan proses transaksi yang hanya memerlukan satu kode QR untuk berbagai aplikasi. Sementara itu, inklusivitas didorong dengan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Dengan demikian, QRIS menjadi bagian dari kebijakan publik yang mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Relevansi administrasi publik digital dengan penelitian ini tampak jelas. Mahasiswa sebagai kelompok *digital native*menjadi aktor penting dalam mengukur efektivitas implementasi QRIS. Tingkat literasi digital mahasiswa menentukan kemampuan mereka dalam memahami manfaat, mengoperasikan aplikasi pembayaran, serta memanfaatkan layanan digital secara optimal. Penelitian mengenai hubungan antara literasi digital dan efektivitas penggunaan QRIS pada mahasiswa di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan implementasi kebijakan publik digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai penggunaan QRIS sebagai teknologi, tetapi juga menempatkannya dalam konteks administrasi publik digital, pelayanan publik, e-government, serta praktik *goodgovernance* di Indonesia.

**2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah alur pemikiran yang menjelaskan hubungan logis antara konsep-konsep penelitian berdasarkan teori, konsep, serta penelitian terdahulu. Fungsinya adalah memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana literasi digital berhubungan dengan efektivitas penggunaan layanan publik digital dalam konteks penelitian ini (Creswell, 2018).

Penelitian ini berfokus pada peran literasi digital dalam memengaruhi efektivitas penggunaan QuickResponse Code Indonesian Standard (QRIS) di kalangan mahasiswa. Literasi digital dipahami sebagai seperangkat kompetensi yang mencakup kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi berbasis digital (UNESCO, 2018). Bagi mahasiswa sebagai generasi *digital native*, literasi digital menjadi syarat penting untuk memanfaatkan layanan publik digital. Tanpa literasi digital yang memadai, mahasiswa berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses, memahami, maupun mengoptimalkan pemanfaatan QRIS.

Efektivitas dalam pelayanan publik digital mengacu pada sejauh mana layanan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memudahkan akses, mempercepat proses, meningkatkan kepuasan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Dunn, 2018). QRIS yang diterapkan Bank Indonesia sejak 2019 merupakan inovasi pelayanan publik digital yang dirancang untuk menyederhanakan transaksi pembayaran dengan satu kode QR lintas aplikasi (Bank Indonesia, 2020). Namun, efektivitas QRIS sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna, terutama terkait literasi digital.

Hubungan antara literasi digital dan efektivitas QRIS dapat dijelaskan melalui logika sederhana: semakin tinggi literasi digital mahasiswa, semakin besar kemampuan mereka untuk memahami manfaat QRIS, mengoperasikan aplikasi pembayaran dengan benar, serta menjaga keamanan transaksi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya efektivitas QRIS sebagai inovasi pelayanan publik digital. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan kendala teknis maupun psikologis, seperti kebingungan dalam penggunaan aplikasi, keraguan terhadap keamanan, atau ketidakmampuan memanfaatkan fitur yang tersedia.

QRIS sebagai bagian dari kebijakan publik digital juga terkait dengan prinsip *goodgovernance* dan *e-government*. Transparansi, akuntabilitas, serta inklusivitas yang melekat pada QRIS hanya dapat tercapai apabila masyarakat memiliki literasi digital yang cukup untuk menggunakannya. Oleh karena itu, mahasiswa menjadi kelompok yang penting untuk diteliti karena mereka tidak hanya pengguna aktif layanan digital, tetapi juga representasi kesiapan generasi muda dalam mendukung transformasi administrasi publik digital di Indonesia (Heeks, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi QRIS. Dengan kata lain, kompetensi digital mahasiswa menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik di bidang sistem pembayaran digital. Hubungan konseptual ini digambarkan lebih lanjut dalam diagram kerangka berpikir berikut (gambar 1 kerangka pemikiran).

•QRIS diluncurkan sebagai inovasi pembayaran digital untuk mendukung efisiensi dan cashlesssociety.

•Mahasiswa UNILA sudah mengenal QRIS, tetapi belum seluruhnya memanfaatkannya dalam transaksi sehari-hari.

•Kendala yang muncul meliputi keterbatasan pemahaman, kebiasaan menggunakan uang tunai, serta keraguan terhadap keamanan.

•Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas penggunaan QRIS di kalangan mahasiswa dapat tercapai.

•Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

•*Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* 2025 (Bank Indonesia).

•Program cashlesssociety sejak 2014.

•Implementasi QRIS oleh Bank Indonesia sejak 2019.

•Mahasiswa Universitas Lampung (UNILA) sebagai *digital native* dan pengguna aktif layanan digital.

•Lingkungan kampus menyediakan berbagai layanan transaksi, sebagian sudah mendukung pembayaran digital melalui QRIS.

•Pemanfaatan QRIS di kalangan mahasiswa masih bervariasi: ada yang rutin, ada yang terbatas, bahkan ada yang belum memanfaatkan.

•Mahasiswa tidak hanya mengetahui tetapi juga konsisten memanfaatkan QRIS.

•QRIS digunakan secara efektif: mudah, cepat, aman, dan diterima luas.

•Mendukung transformasi pelayanan publik digital yang inklusif, transparan, dan efisien.

*Sumber: (Diolah Oleh Peneliti, 2025)*

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

**Daftar Pustaka**

Bank Indonesia. (2020). *Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.

Creswell, J. W. (2018). *Researchdesign: Qualitative, quantitative, andmixedmethodsapproaches*(5th ed.). SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2018). *Publicpolicyanalysis: An integratedapproach* (6th ed.). Routledge.

Ferrari, A. (2013). *DIGCOMP: A frameworkfordevelopingandunderstanding digital competence in Europ*e. Publications Office oftheEuropean Union.

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. WileyComputerPublishing.

Heeks, R. (2018). *Informationandcommunicationtechnologyfordevelopment*(ICT4D) (2nd ed.). Routledge.

Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 95.

Prasetyo, A. D. (2025). Analisis pengaruh efektivitas dan efisiensi QuickResponse Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap inklusi keuangan dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 11*(1), 45–60. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ramba, A. R. (2024). Pengaruh literasi keuangan digital, perceivedenjoyment, efikasi diri, dan pengaruh sosial terhadap intentiontouse QRIS payment. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Digital, 6*(1), 55–70. Universitas Hasanuddin.

Saputra, K., & Hendrianto, H. (2023). Efektivitas penggunaan QuickResponse Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran digital pada dosen ASN IAIN Curup. *Jurnal Administrasi Publik, 9*(2), 101–115. Institut Agama Islam Negeri Curup.

UNESCO. (2018). *Digital literacy global framework*. United NationsEducational, ScientificandCulturalOrganization.

United Nations. (2022). *E-governmentsurvey 2022: The futureof digital government*. United Nations.